

Akselerasi Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian

Peta Jalan Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang untuk Meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama

Pendahuluan: Transformasi Pembangunan Pertanian Melalui Lensa Gender

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan tolok ukur prestisius bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada seluruh spektrum pembangunan. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan secara khusus bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan, APE seyogianya tidak dipandang sebagai beban administratif atau sekadar kompetisi tahunan. Sebaliknya, formulir penilaian APE harus dimaknai sebagai kerangka kerja strategis yang komprehensif untuk mentransformasi sektor pertanian dan perkebunan menjadi lebih adil, inklusif, berkelanjutan, dan pada akhirnya, lebih produktif. Mengintegrasikan PUG secara sistematis berarti membuka potensi sumber daya manusia yang selama ini belum tergarap optimal, khususnya perempuan, yang memegang peranan vital namun seringkali tidak terlihat dalam rantai nilai pertanian.

Laporan ini disusun sebagai panduan operasional *end-to-end* yang dirancang khusus untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang. Tujuannya adalah menerjemahkan setiap indikator, variabel, dan persyaratan bukti dukung dalam instrumen penilaian APE menjadi serangkaian langkah-langkah aksi yang konkret, terukur, dan relevan dengan konteks sektor pertanian. Dengan pendekatan ini, Dinas tidak hanya akan mampu memenuhi persyaratan minimum untuk penilaian, tetapi juga berpeluang besar untuk meraih nilai terbaik dan menjadi teladan dalam pembangunan pertanian yang responsif gender.

Struktur laporan ini dirancang untuk memandu Dinas secara logis dan bertahap. Bab pertama akan berfokus pada pembangunan fondasi kelembagaan PUG yang kokoh di internal Dinas, bergerak dari sekadar pemenuhan kepatuhan formal menuju penciptaan kompetensi fungsional. Bab kedua akan menguraikan secara rinci bagaimana mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus pembangunan—mulai dari perencanaan dan penganggaran, implementasi di lapangan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel. Bab ketiga akan menjadi puncak dari strategi ini, dengan menyajikan konsep-konsep inovasi berdampak tinggi yang dirancang khusus untuk sektor pertanian, yang tidak hanya akan menjawab kriteria penilaian APE tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tani di Bengkayang. Laporan ini ditutup dengan sebuah

rencana aksi 12 bulan yang terukur, memberikan peta jalan yang jelas bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas untuk memulai dan mengawal proses akselerasi PUG menuju pencapaian APE Kategori Utama.

Bab 1: Membangun Fondasi Kelembagaan PUG yang Kokoh: Dari Kepatuhan Menuju Kompetensi

Fondasi keberhasilan implementasi PUG terletak pada kekuatan kelembagaan internal Perangkat Daerah (PD). Penilaian APE memberikan bobot yang signifikan pada aspek pelembagaan, yang mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, mekanisme kerja yang fungsional, dan ketersediaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Banyak instansi pemerintah terjebak pada pemenuhan kepatuhan di level permukaan, seperti memiliki Surat Keputusan (SK) penunjukan atau sertifikat pelatihan. Namun, untuk meraih nilai tertinggi, Kabupaten Bengkayang harus mampu menunjukkan bahwa struktur kelembagaan ini benar-benar hidup, fungsional, dan mampu mendorong transformasi nyata. Setiap elemen kelembagaan bukanlah item

checklist yang terisolasi, melainkan komponen yang saling terhubung dalam sebuah sistem yang aktif. Oleh karena itu, strategi Dinas harus berfokus pada *aktivasi* peran dan struktur ini, bukan sekadar pembentukannya di atas kertas.

1.1. Peningkatan Kapasitas SDM sebagai Agen Perubahan Internal

Indikator 2.1 dalam formulir penilaian APE secara eksplisit menuntut adanya SDM yang terlatih PUG di berbagai fungsi krusial: perencana dan penganggaran, teknis/pelaksana, serta pemantau, evaluasi, dan pelaporan. Memiliki SDM yang terlatih bukan sekadar tentang mengumpulkan sertifikat, tetapi tentang memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh diaplikasikan secara nyata dalam tugas sehari-hari. SDM yang kompeten adalah agen perubahan yang akan memastikan setiap dokumen perencanaan, alokasi anggaran, dan laporan kinerja Dinas telah mengintegrasikan perspektif gender secara benar dan substantif.

Analisis Kebutuhan

Langkah pertama yang harus dilakukan Dinas adalah melakukan pemetaan kompetensi dan kebutuhan pelatihan. Pimpinan Dinas, melalui Sub-bagian Kepegawaian, perlu mengidentifikasi aparatur yang menduduki posisi-posisi strategis di unit perencanaan, bidang-bidang teknis (misalnya, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Penyuluhan), serta unit yang bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar untuk merancang program peningkatan kapasitas yang terstruktur dan tepat sasaran.

Rencana Aksi Pelatihan

Program pelatihan harus dirancang secara berjenjang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda di setiap level dan fungsi jabatan:

- **Tingkat Dasar (Wajib untuk Pejabat Eselon III, IV, dan Staf Fungsional Umum):** Dinas perlu proaktif bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Kabupaten Bengkayang untuk menyelenggarakan sesi sosialisasi atau *in-house training*. Materi pelatihan tingkat dasar ini mencakup pemahaman konsep dasar gender dan PUG, pentingnya data terpilah, serta pengenalan awal terhadap isu-isu gender di sektor pertanian. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan pemahaman bersama di seluruh jajaran Dinas.
- **Tingkat Lanjut (Wajib untuk Tim Perencana, Anggaran, dan PUG Focal Point):** Aparatur yang bertanggung jawab langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dan penganggaran (RKA) harus mendapatkan pelatihan teknis yang lebih mendalam. Dinas harus mengupayakan agar para perencana kunci ini diikutsertakan dalam pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau pusat. Fokus utama pelatihan ini adalah penguasaan alat analisis praktis seperti *Gender Analysis Pathway (GAP)* untuk perencanaan dan *Gender Budget Statement (GBS)* untuk penganggaran. Kemampuan menggunakan alat ini adalah kunci untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas dan memenuhi standar penilaian APE.

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

Untuk memaksimalkan skor pada indikator ini, Dinas harus menyiapkan portofolio bukti dukung yang komprehensif, meliputi:

1. Salinan sertifikat pelatihan PUG/PPRG yang diikuti oleh staf.
2. Laporan lengkap pelaksanaan *in-house training* atau sosialisasi internal, yang wajib melampirkan daftar hadir peserta, surat undangan, dokumentasi foto, materi yang disampaikan, serta notulensi kegiatan.
3. Bukti paling kuat dan transformatif: Salinan dokumen perencanaan (Renja) atau penganggaran (RKA) yang secara nyata disusun atau direvisi oleh SDM yang telah terlatih, yang menunjukkan aplikasi langsung dari pengetahuan yang diperoleh. Misalnya, melampirkan dokumen GAP yang telah diisi untuk sebuah program prioritas.

1.2. Mengaktivasi Focal Point PUG sebagai Motor Penggerak Internal

Penunjukan *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah adalah syarat mutlak dalam pelembagaan PUG, sebagaimana tercantum dalam Indikator 2.3. Namun, nilai pembeda terletak pada sejauh mana

Focal Point tersebut berfungsi secara efektif sebagai motor penggerak PUG di lingkungan internalnya. Seorang *Focal Point* yang pasif, yang keberadaannya hanya sebatas SK, tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai APE. Sebaliknya, *Focal Point* yang aktif dan proaktif adalah aset strategis yang akan mengawal dan memastikan seluruh proses PUG berjalan dengan baik di Dinas.

Dasar Hukum

Apabila belum ada, Kepala Dinas harus segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menunjuk seorang pejabat (disarankan setingkat Eselon III atau Fungsional Ahli Madya yang memiliki pengaruh) sebagai *Focal Point* PUG Dinas Pertanian dan Perkebunan. SK ini harus secara jelas mencantumkan tugas dan tanggung jawab yang merujuk pada panduan penilaian APE.

Optimalisasi Peran

Peran *Focal Point* tidak boleh berhenti pada koordinasi semata. Ia harus menjadi seorang "champion" atau advokat PUG di internal Dinas. Untuk mengaktivasi peran ini, *Focal Point* harus:

1. **Menyusun Rencana Aksi Tahunan:** Segera setelah ditunjuk, *Focal Point* harus menyusun Rencana Aksi Tahunan yang konkret dan terukur. Rencana aksi ini harus mencakup jadwal kegiatan fasilitasi, advokasi, dan asistensi PUG di internal Dinas.
2. **Menjadi Fasilitator Internal:** Secara proaktif memfasilitasi proses-proses kunci PUG, seperti memandu pengisian formulir GAP bersama tim perencana di setiap bidang, membantu mengidentifikasi kebutuhan data terpilah, dan memberikan asistensi dalam penyusunan justifikasi GBS.
3. **Melakukan Sosialisasi dan Kampanye Internal:** Secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau diskusi singkat (misalnya saat apel pagi atau rapat dinas) untuk terus mengingatkan dan meningkatkan pemahaman seluruh staf mengenai pentingnya PUG dalam program-program pertanian.
4. **Menyusun Laporan Berkala:** Membuat laporan kegiatan triwulanan atau semesteran yang mendokumentasikan semua aktivitas yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas. Laporan ini adalah bukti kinerja yang sangat penting.

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

Portofolio *Focal Point* yang kuat harus berisi:

1. Salinan SK Penunjukan *Focal Point* PUG oleh Kepala Dinas.
2. Dokumen Rencana Aksi Tahunan *Focal Point* yang telah disetujui.
3. Laporan Kegiatan Berkala *Focal Point*, yang melampirkan bukti-bukti pelaksanaan tugas. Contoh konkret: "Laporan Fasilitasi Penyusunan Analisis Gender untuk Rencana Kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 202X," lengkap dengan dokumentasi dan daftar hadir.

1.3. Data Terpilah Sektoral sebagai Kompas Pembangunan Pertanian

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin adalah fondasi dari seluruh siklus Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Tanpa data yang akurat, analisis gender menjadi spekulatif, perencanaan menjadi tidak tepat sasaran, dan penganggaran kehilangan justifikasi yang kuat. Indikator 3.1, 3.2, dan 3.3 dalam formulir APE secara tegas menuntut

ketersediaan dan publikasi data terpilah di tingkat sektoral. Kegagalan dalam menyediakan data ini akan memutus mata rantai logika PPRG dan secara signifikan mengurangi skor penilaian.

Hubungan antara data, perencanaan, dan penganggaran membentuk sebuah siklus yang saling menguatkan. Untuk dapat melakukan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang bermakna pada sebuah program, perencana mutlak membutuhkan data dasar yang terpilah menurut jenis kelamin. Misalnya, mustahil menganalisis kesenjangan dalam program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) tanpa mengetahui data jumlah petani laki-laki dan perempuan yang mengajukan dan menerima bantuan tersebut. Hasil dari analisis GAP inilah—yang mengidentifikasi "isu gender" berbasis data—yang kemudian menjadi dasar argumentasi untuk merumuskan intervensi program yang lebih spesifik dalam Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya, intervensi yang sudah berbasis bukti inilah yang menjadi justifikasi kuat untuk mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan menyusun

Gender Budget Statement (GBS). Dengan demikian, membangun sistem pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah bukan sekadar tugas administratif, melainkan langkah strategis paling fundamental bagi Dinas.

Rencana Aksi Pengembangan Data

1. **Identifikasi Indikator Kunci:** Kepala Dinas perlu membentuk tim kecil lintas bidang (melibatkan perencana, statistisi jika ada, dan *Focal Point* PUG) untuk mengidentifikasi dan menyepakati minimal 10-15 indikator data terpilah paling krusial di sektor pertanian dan perkebunan Bengkayang. Indikator ini harus relevan dengan program-program prioritas Dinas.
2. **Integrasi dalam Sistem Pendataan Rutin:** Langkah paling efektif dan berkelanjutan adalah dengan merevisi formulir-formulir pendataan yang sudah ada. Wajibkan penambahan kolom "Laki-laki" dan "Perempuan" dalam semua instrumen pengumpulan data, seperti formulir pendaftaran anggota Kelompok Tani (Poktan), formulir usulan bantuan bibit/pupuk/alsintan, daftar hadir peserta penyuluhan, dan data penerima manfaat program lainnya.
3. **Publikasi Rutin:** Untuk memenuhi Indikator 3.2 dan 3.3, Dinas harus berkomitmen untuk menerbitkan sebuah publikasi data secara rutin (misalnya, Buletin Data Sektoral Pertanian Responsif Gender) setiap semester atau minimal setahun sekali. Publikasi ini bisa dalam bentuk cetak sederhana atau diunggah di situs web resmi Dinas. Ini adalah bukti dukung yang sangat kuat karena menunjukkan bahwa data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diolah, dianalisis, dan disajikan untuk publik dan para pemangku kepentingan.

Tabel 1: Contoh Indikator Kunci Data Terpilah Sektor Pertanian Bengkayang

Tabel berikut menyajikan contoh konkret indikator data terpilah yang dapat segera diadopsi oleh Dinas. Struktur tabel ini mengacu pada kerangka analisis gender (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat) untuk membiasakan para perencana berpikir secara analitis.

| Kategori Indikator | Nama Indikator | Satuan | Sumber Data Potensial |
|----------------------------------|---|--------------------|---|
| SDM Pertanian | Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) | Orang | Sub-bagian Kepegawaian Dinas |
| | Jumlah Anggota Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) | Orang | Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) / Database Poktan Dinas |
| | Jumlah Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) | Orang | Database KWT Dinas |
| Akses Sumber Daya | Penerima Bantuan Bibit Unggul (Padi, Jagung, Karet, Sawit, dll.) | Orang/KK | Laporan Penyaluran Bantuan Bidang Teknis |
| | Penerima Bantuan Pupuk Bersubsidi | Orang/KK | Data dari Distributor Pupuk / Kartu Tani |
| | Penerima Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) | Orang/Unit | Laporan Penyaluran Bantuan Bidang Sarana & Prasarana |
| | Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian | Orang/Rupiah | Data dari Bank Penyalur KUR (melalui koordinasi) |
| Partisipasi & Kontrol | Peserta dalam Musrenbang Sektor Pertanian (Tingkat Desa/Kec.) | Orang | Laporan Musrenbang |
| | Peserta Pelatihan Teknis Budidaya / Pascapanen | Orang | Laporan Kegiatan Pelatihan Bidang Teknis/Penyuluhan |
| | Jumlah Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Poktan/Gapoktan | Orang | Database Poktan Dinas |
| | Jumlah Pengurus KWT | Orang | Database KWT Dinas |
| Manfaat Ekonomi | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Skala Rumah Tangga | Orang/Unit Usaha | Data dari Bidang Pascapanen & Pemasaran / Survei |
| | Rata-rata Pendapatan dari Usaha Tani (jika memungkinkan) | Rupiah/Musim Tanam | Survei Khusus / Studi Kasus |

Export to Sheets

Dengan membangun fondasi kelembagaan yang kokoh melalui tiga pilar ini—SDM yang kompeten, *Focal Point* yang aktif, dan sistem data terpilah yang fungsional—Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang akan memiliki landasan yang kuat untuk melangkah ke tahap selanjutnya: mengintegrasikan PUG secara sistematis ke dalam seluruh siklus pembangunan.

Bab 2: Mengintegrasikan PUG dalam Nadi Siklus Pembangunan Pertanian

Setelah fondasi kelembagaan terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan perspektif gender terintegrasi secara nyata dan sistematis ke dalam setiap tahapan siklus pembangunan. Penilaian APE secara detail menguji integrasi ini mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Tahapan ini adalah "jantung" dari implementasi PUG, di mana komitmen dan kapasitas kelembagaan diuji dalam praktik nyata. Bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan, ini berarti setiap program, mulai dari penyuluhan, distribusi bantuan, hingga pengembangan agribisnis, harus dirancang dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh akan kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang berbeda antara petani laki-laki dan perempuan.

2.1. Perencanaan yang Melihat Kebutuhan Berbeda (PPRG)

Perencanaan Responsif Gender (PPRG) adalah titik awal yang menentukan arah dan kualitas seluruh implementasi PUG. Rencana yang "buta gender" akan menghasilkan program yang tidak tepat sasaran dan berpotensi memperlebar kesenjangan. Formulir APE menuntut bukti bahwa analisis gender telah dilakukan dan hasilnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra PD) dan tahunan (Renja PD).

Penerapan Analisis Gender

Untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, Dinas harus mewajibkan penggunaan alat analisis gender yang sistematis. Alat yang paling umum digunakan dan direkomendasikan adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP adalah kerangka kerja terstruktur untuk membedah sebuah kebijakan atau program guna mengidentifikasi kesenjangan gender dalam empat aspek kunci: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat. Penggunaan GAP mengubah proses perencanaan dari yang berbasis asumsi menjadi berbasis bukti (data).

Langkah Praktis Penyusunan GAP untuk Program Pertanian

Focal Point PUG bersama tim perencana Dinas harus memfasilitasi penyusunan GAP untuk program-program atau kegiatan-kegiatan prioritas. Berikut adalah langkah-langkah praktisnya dengan contoh kegiatan "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani melalui Sekolah Lapang":

1. **Langkah 1: Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan:** Pilih kegiatan yang akan dianalisis, misalnya: "Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Budidaya Padi Organik."
2. **Langkah 2: Kumpulkan Data Terpilah:** Kumpulkan data terkait peserta SL tahun-tahun sebelumnya. Berapa persen peserta laki-laki dan perempuan? Bagaimana profil mereka (usia, status kepemilikan lahan)? Gunakan data dari Tabel 1 di Bab sebelumnya.
3. **Langkah 3: Analisis Kesenjangan Gender (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat):**

- **Akses:** Apakah informasi tentang jadwal SL menjangkau perempuan sama efektifnya dengan laki-laki? Apakah ada hambatan bagi perempuan untuk mendaftar (misalnya, harus seizin suami, lokasi jauh)?
 - **Partisipasi:** Data menunjukkan partisipasi perempuan hanya 20%. Mengapa? Wawancara dengan beberapa petani perempuan mengungkapkan bahwa jadwal SL (pagi hari) bentrok dengan kewajiban domestik (menyiapkan anak sekolah, memasak).
 - **Kontrol:** Siapa yang memutuskan penerapan teknologi hasil SL di lahan keluarga? Apakah perempuan memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan ini?
 - **Manfaat:** Apakah peningkatan hasil panen dari penerapan teknologi SL dinikmati secara adil? Siapa yang mengontrol pendapatan tambahan yang dihasilkan?
4. **Langkah 4: Identifikasi "Isu Gender":** Berdasarkan analisis di atas, isu gender yang teridentifikasi adalah: "Rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan adopsi teknologi Sekolah Lapang disebabkan oleh hambatan waktu (beban kerja ganda) dan norma sosial yang membatasi."
5. **Langkah 5: Rumuskan Rencana Aksi/Kebijakan Responsif Gender:** Untuk mengatasi isu tersebut, rumuskan rencana aksi konkret:
- Menjadwalkan ulang sesi pertemuan SL di sore hari atau menyesuaikannya berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok perempuan.
 - Menyediakan fasilitas penitipan anak sementara (pojok bermain) di dekat lokasi SL bekerja sama dengan kader PKK desa.
 - Membuat modul SL yang secara eksplisit membahas peran bersama laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan usaha tani keluarga.
 - Menargetkan kuota partisipasi perempuan minimal 30%-40% dalam pelaksanaan SL berikutnya.

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

Bukti dukung utama dan paling bernilai tinggi adalah dokumen Renstra dan Renja Dinas yang pada lampirannya memuat Formulir GAP yang telah diisi secara lengkap dan substantif untuk beberapa program unggulan. Ini menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar didasari oleh analisis yang mendalam.

2.2. Anggaran yang Berpihak pada Kesetaraan (ARG)

Perencanaan yang responsif gender akan sia-sia jika tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Anggaran Responsif Gender (ARG) bukanlah anggaran terpisah untuk perempuan, melainkan anggaran dalam program/kegiatan yang dialokasikan untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dirumuskan dalam GAP guna mengatasi kesenjangan gender. Penilaian APE sangat menekankan adanya kegiatan/sub-kegiatan yang memiliki ARG dan menuntut adanya peningkatan alokasi dari tahun ke tahun.

Dari GAP ke Gender Budget Statement (GBS)

Alat utama untuk mengartikulasikan kebutuhan ARG adalah *Gender Budget Statement (GBS)* atau Pernyataan Anggaran Gender. GBS adalah dokumen argumentasi atau justifikasi yang menyertai usulan anggaran (RKA). Dokumen ini menjelaskan secara logis: (1) Isu gender apa yang ingin diatasi (diambil dari GAP), (2) Rencana aksi yang akan dilakukan, (3) Output yang diharapkan, dan (4) Rincian komponen biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi tersebut.

Contoh Sub-Kegiatan Responsif Gender di Bidang Ekonomi (Pertanian)

Melanjutkan contoh dari GAP sebelumnya, rencana aksi untuk Sekolah Lapang dapat diterjemahkan ke dalam sub-kegiatan dengan ARG.

- **Program:** Program Peningkatan Produksi Pangan.
- **Kegiatan:** Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petani.
- **Sub-Kegiatan Responsif Gender:** "Pelaksanaan Sekolah Lapang Padi Organik Responsif Gender di Desa X".
- **Justifikasi dalam GBS:** "Sub-kegiatan ini dirancang untuk mengatasi rendahnya partisipasi perempuan dalam pelatihan teknis. Alokasi anggaran spesifik dibutuhkan untuk..."
- **Komponen ARG:**
 - Biaya fasilitator untuk sesi sore hari (potensi lembur atau insentif tambahan).
 - Biaya penyediaan pojok bermain anak (pembelian mainan edukatif, honorarium kader PKK).
 - Biaya cetak modul khusus yang memuat materi kesetaraan gender dalam usaha tani.
 - Biaya sosialisasi khusus kepada kelompok-kelompok perempuan untuk mendorong pendaftaran.

Target Penilaian

Untuk mendapatkan nilai maksimal, Dinas harus menargetkan:

1. **Peningkatan Kuantitas:** Menambah jumlah sub-kegiatan yang memiliki ARG setiap tahunnya. Mulailah dengan 2-3 sub-kegiatan di tahun pertama, lalu tingkatkan secara bertahap.
2. **Peningkatan Kualitas (Nilai Rupiah):** Meningkatkan total nilai rupiah ARG dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan komitmen anggaran yang semakin serius.
3. **Distribusi:** Memastikan sub-kegiatan RG tersebar di berbagai bidang (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dll.), tidak hanya terkonsentrasi di satu bidang.

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

Bukti dukung yang paling valid adalah salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang pada kolom keterangan atau lampirannya memuat dokumen GBS atau *Term of Reference (TOR)* yang secara eksplisit menjelaskan justifikasi responsif gendernya.

2.3. Implementasi Program yang Memberdayakan: KWT sebagai Mitra Strategis

Implementasi adalah tahap di mana rencana dan anggaran diwujudkan menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penilaian APE menuntut adanya "Output yang mendukung pemberdayaan perempuan". Bagi Dinas Pertanian, upaya pemberdayaan perempuan akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien jika tidak dilakukan secara sporadis kepada individu, melainkan melalui penguatan kelembagaan yang sudah ada di tingkat akar rumput, yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT).

KWT adalah mitra strategis dan "kendaraan pengiriman" (*delivery vehicle*) yang paling efektif untuk program-program PUG Dinas. Mereka adalah kelompok yang sudah terorganisir, memiliki modal sosial, dan memahami konteks lokal. Memperkuat KWT berarti memperkuat kemampuan Dinas dalam mencapai target-target pemberdayaan perempuan secara masif dan berkelanjutan. Alih-alih merancang program baru dari atas, strategi yang lebih cerdas adalah menyalurkan dan merancang program pelatihan, transfer teknologi, dan akses pasar melalui dan bersama KWT.

Rencana Aksi Penguatan KWT

1. **Pemetaan dan Klasifikasi KWT:** Langkah awal adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap seluruh KWT yang ada di Kabupaten Bengkayang. Data yang dikumpulkan harus mencakup nama kelompok, jumlah anggota, jenis usaha, dan tingkat aktivitas. Berdasarkan data ini, lakukan klasifikasi KWT menjadi tiga kategori: **Pemula** (baru terbentuk, kegiatan sporadis), **Berkembang** (memiliki produk namun belum konsisten), dan **Maju** (memiliki produk unggulan, pasar, dan manajemen yang baik).
2. **Program Pemberdayaan Terpadu dan Berjenjang:** Rancang modul program yang disesuaikan dengan level klasifikasi KWT:
 - **Untuk KWT Pemula:** Fokus pada penguatan kelembagaan, motivasi, dan pelatihan dasar budidaya atau pengolahan skala kecil.
 - **Untuk KWT Berkembang:** Fokus pada peningkatan kualitas dan standarisasi produk, manajemen usaha dan keuangan sederhana, serta pengenalan dasar-dasar pemasaran.
 - **Untuk KWT Maju:** Fokus pada fasilitasi sertifikasi (P-IRT, Halal), akses ke pasar yang lebih luas (kemitraan dengan swalayan, hotel), dan akses permodalan formal seperti KUR.
3. **Pelibatan Mitra Pentahelix:** Untuk memaksimalkan dampak, Dinas harus secara aktif menggandeng mitra lain sebagaimana dituntut dalam Indikator 1.b di Bagian Pelaksanaan.
 - **Akademisi:** Bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk pendampingan teknologi pengolahan atau penelitian.
 - **Dunia Usaha:** Menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta (misalnya, hotel, restoran, toko oleh-oleh) sebagai offtaker produk KWT.
 - **Lembaga Masyarakat (LSM/NGO):** Bekerja sama dengan LSM yang memiliki program pemberdayaan perempuan untuk sinergi kegiatan.

- **Media:** Menggandeng media lokal untuk mempublikasikan kisah sukses KWT dan mempromosikan produk mereka.

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

1. Laporan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan KWT, lengkap dengan dokumentasi foto/video, daftar hadir, dan materi pelatihan.
2. Profil KWT-KWT unggulan yang dibina oleh Dinas, yang menceritakan perjalanan dan dampak program.
3. Salinan Perjanjian Kerja Sama (MoU) atau bukti kemitraan lainnya dengan pihak akademisi, dunia usaha, atau lembaga masyarakat dalam mendukung program KWT.

2.4. Membangun Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Internal yang Responsif Gender

Siklus pembangunan tidak akan lengkap tanpa mekanisme untuk memantau kemajuan, mengevaluasi dampak, dan mengawasi kepatuhan. Penilaian APE memiliki bagian khusus untuk Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan yang responsif gender. Dinas harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem internal yang robust untuk memastikan program PUG berjalan di jalur yang benar dan mencapai tujuannya.

Mekanisme Internal

Kunci utamanya adalah mengintegrasikan indikator-indikator PUG ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi (monev) rutin yang sudah ada di Dinas, bukan menciptakan sistem baru yang terpisah. Untuk melembagakannya, perlu disusun sebuah Pedoman atau Petunjuk Teknis (Juknis) Monev PUG Internal Dinas.

Fokus Monev, Evaluasi, dan Pengawasan

1. **Pemantauan (Dilakukan secara berkala/triwulanan):** Fokus pada proses dan output. Pertanyaan kuncinya adalah: "Apakah sub-kegiatan RG berjalan sesuai rencana? Apakah target output (misalnya, jumlah perempuan yang dilatih) tercapai? Apa saja kendala di lapangan?" Hasil pemantauan digunakan untuk perbaikan cepat (*corrective action*). Bukti dukungannya adalah Laporan Pemantauan Triwulanan.
2. **Evaluasi (Dilakukan tahunan):** Fokus pada hasil dan dampak (*outcome*). Pertanyaan kuncinya adalah: "Apa perubahan yang terjadi pada kehidupan penerima manfaat setelah mengikuti program? Apakah pendapatan anggota KWT meningkat? Apakah kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi membaik?" Evaluasi membutuhkan metode seperti survei atau *focus group discussion* (FGD). Hasilnya digunakan untuk perencanaan program di tahun berikutnya. Bukti dukungannya adalah Laporan Evaluasi Dampak Tahunan.
3. **Pengawasan (Dilakukan oleh APIP/Inspektorat):** Fokus pada kepatuhan dan kualitas proses. Pertanyaan kuncinya adalah: "Apakah proses perencanaan dan penganggaran di Dinas sudah mematuhi kaidah-kaidah PPRG? Apakah dokumen GAP dan GBS disusun dengan benar?" APIP/Inspektorat harus memberikan

rekomendasi perbaikan yang konkret. Bukti dukungannya adalah Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP yang secara spesifik membahas PUG.

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

1. Dokumen Pedoman/Juknis Monev PUG Internal Dinas.
2. Contoh Laporan Hasil Pemantauan Triwulanan.
3. Contoh Laporan Evaluasi Dampak Tahunan.
4. Salinan Laporan Hasil Reviu dari Inspektorat Daerah yang berisi rekomendasi terkait penyelenggaraan PUG di Dinas.

2.5. Pelaporan yang Menarasikan Capaian Gender

Tahap terakhir dari siklus adalah pelaporan. Pelaporan yang baik bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan sebuah narasi yang menunjukkan akuntabilitas dan mengkomunikasikan capaian kinerja. Penilaian APE mengharuskan penyelenggaraan PUG dilaporkan secara terintegrasi dalam dokumen-dokumen akuntabilitas resmi pemerintah daerah, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Integrasi dalam Laporan Kinerja

Kesalahan umum adalah melaporkan kegiatan PUG dalam bab terpisah atau sebagai lampiran, yang membuatnya terkesan sebagai program tambahan. Praktik terbaik adalah mengintegrasikan analisis dan capaian gender ke dalam narasi utama laporan kinerja. Misalnya, saat melaporkan capaian indikator kinerja "Peningkatan Produksi Padi," tambahkan paragraf analisis yang menjelaskan kontribusi petani perempuan dan bagaimana program Sekolah Lapang Responsif Gender telah berhasil meningkatkan partisipasi dan produktivitas mereka.

Struktur Pelaporan yang Ideal

Setiap kali membahas program prioritas dalam LAKIP/LAKIN, usahakan untuk menyertakan struktur narasi berikut:

1. **Analisis Situasi:** Paparkan secara singkat isu gender yang relevan dengan program tersebut, didukung oleh data terpilah.
2. **Intervensi yang Dilakukan:** Jelaskan program/kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan untuk mengatasi isu tersebut.
3. **Alokasi Anggaran:** Sebutkan alokasi ARG yang telah digunakan.
4. **Capaian Kinerja:** Sajikan capaian output dan outcome, selalu dengan data terpilah (misalnya, "...melatih 100 petani, terdiri dari 45 perempuan dan 55 laki-laki, dan berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata KWT sebesar 15%").

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

Bukti dukung yang harus disiapkan adalah salinan (fotokopi atau file PDF) dari bab atau bagian relevan dari dokumen LAKIP/LAKIN Dinas, LKPJ, dan LPPD Kabupaten Bengkayang

yang secara eksplisit dan substantif membahas penyelenggaraan dan capaian PUG di sektor pertanian.

Dengan menguasai dan menerapkan PUG dalam seluruh siklus pembangunan ini, Dinas tidak hanya akan memenuhi tuntutan administratif APE, tetapi juga secara fundamental akan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keadilan dari setiap program pembangunan pertanian yang dijelankannya.

Bab 3: Melahirkan Inovasi PUG yang Berdampak Luas di Sektor Pertanian

Untuk mencapai kategori tertinggi dalam Anugerah Parahita Ekapraya, sekadar memenuhi indikator yang ada tidaklah cukup. Bagian III dari formulir penilaian secara khusus menyoroti pentingnya "Inovasi". Inovasi dalam konteks PUG bukanlah kegiatan biasa yang diberi nama baru, melainkan sebuah terobosan dalam kebijakan, program, layanan, atau teknologi yang secara signifikan mempercepat pencapaian kesetaraan gender. Inovasi yang dinilai tinggi adalah yang mampu menunjukkan perubahan nyata, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kreativitas dan kepemimpinan dengan menciptakan program-program unggulan yang tidak hanya unik tetapi juga memberikan dampak transformatif bagi perempuan tani di Bengkayang.

Salah satu pendekatan paling strategis untuk inovasi di sektor pertanian adalah melalui pengenalan teknologi. Teknologi yang tepat guna dapat berfungsi sebagai "akselerator PUG" dengan secara langsung mengatasi akar masalah ketidaksetaraan gender di pedesaan, seperti beban kerja fisik yang berat dan kemiskinan waktu (*time poverty*) yang dialami perempuan. Dengan merancang program yang memfasilitasi akses perempuan terhadap teknologi ramah perempuan, Dinas dapat menciptakan inovasi yang memiliki daya ungkit, signifikansi, dan dampak masif yang tinggi.

3.1. Membedah Kriteria Inovasi APE untuk Sektor Pertanian

Sebelum merancang program inovatif, penting untuk memahami secara mendalam tiga kriteria utama yang digunakan dalam penilaian APE. Menerjemahkan konsep abstrak ini ke dalam konteks pertanian akan membantu Dinas merancang inovasi yang tepat sasaran.

- **Daya Ungkit (Leverage):** Kriteria ini mengukur tingkat kebaruan dan potensi perubahan sistemik dari sebuah inovasi.
 - *Nilai Rendah:* Melakukan program yang sama dengan daerah lain (replikasi biasa).
 - *Nilai Sedang:* Mengadopsi program dari daerah lain tetapi dengan modifikasi sesuai kearifan lokal Bengkayang.
 - *Nilai Tinggi:* Menciptakan gagasan yang benar-benar baru atau mengintegrasikan beberapa sistem yang sebelumnya terpisah. Contoh di sektor pertanian: mengintegrasikan sistem produksi KWT dengan platform

pemasaran digital dan sistem pembayaran non-tunai. Ini menunjukkan adanya keterbaruan dan integrasi sistem.

- **Signifikansi (Significance):** Kriteria ini mengukur sejauh mana inovasi tersebut secara strategis mendukung tujuan PUG dan dicapai melalui cara-cara kreatif.
 - *Nilai Rendah:* Program yang merupakan tugas rutin dan dicapai dengan cara konvensional.
 - *Nilai Sedang:* Program yang dilakukan dengan pendekatan adaptif atau kolaborasi terbatas.
 - *Nilai Tinggi:* Program yang tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pertanian, tetapi secara sadar dan strategis dirancang untuk meningkatkan posisi tawar dan kontrol perempuan atas pendapatan dan sumber daya. Contoh: Program yang mengubah perempuan dari sekadar buruh tani menjadi pemilik usaha pengolahan hasil pertanian.
- **Dampak Masif (Massive Impact):** Kriteria ini mengukur jangkauan dan potensi replikasi dari inovasi tersebut.
 - *Nilai Rendah:* Inovasi yang tidak diakses atau tidak memberikan dampak nyata.
 - *Nilai Sedang:* Inovasi yang memberikan dampak positif hanya pada satu kelompok atau satu desa.
 - *Nilai Tinggi:* Inovasi yang modelnya terbukti berhasil dan berpotensi besar untuk diterapkan (direplikasi) di seluruh desa di Kabupaten Bengkayang, bahkan menjadi inspirasi bagi daerah lain.

3.2. Inovasi Program: "KWT Bengkayang Naik Kelas: Digitalisasi dari Hulu ke Hilir"

Ini adalah sebuah konsep program terpadu yang dirancang untuk mentransformasi KWT dari sekadar kelompok produksi subsisten menjadi entitas agribisnis modern yang kompetitif. Program ini secara holistik menyentuh seluruh rantai nilai dan dirancang secara spesifik untuk memenuhi ketiga kriteria inovasi APE.

Konsep Program

Program "KWT Bengkayang Naik Kelas" adalah sebuah ekosistem pemberdayaan yang mengintegrasikan empat pilar utama: produksi modern, pengolahan bernilai tambah, pemasaran digital, dan literasi keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian, pendapatan, dan kontrol ekonomi perempuan tani secara signifikan.

Komponen Program

1. **Pilar Hulu (Produksi Cerdas):** Pengenalan dan fasilitasi akses terhadap teknologi pertanian tepat guna yang ramah perempuan. Fokus pada teknologi yang dapat mengurangi beban kerja fisik dan meningkatkan efisiensi, seperti yang akan dibahas pada poin 3.3.
2. **Pilar Tengah (Pascapanen & Nilai Tambah):** Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi KWT untuk mengolah hasil panen mentah menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi (misalnya, cabai menjadi saus sambal kemasan,

singkong menjadi tepung mocaf). Pelatihan ini mencakup desain kemasan modern yang menarik, branding, dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi dasar seperti Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Halal.

3. **Pilar Hilir (Pemasaran Digital):** Membangun sebuah platform sederhana (misalnya, katalog produk online via website atau media sosial) yang menampilkan produk-produk unggulan dari seluruh KWT binaan di Bengkayang. Memberikan pelatihan praktis kepada anggota KWT (terutama generasi muda) tentang cara menggunakan smartphone untuk fotografi produk, membuat konten promosi sederhana, dan bertransaksi melalui marketplace atau WhatsApp Business.
4. **Pilar Pendukung (Literasi Keuangan):** Bekerja sama dengan lembaga keuangan (seperti Bank Kalbar atau BPR) untuk memberikan pelatihan manajemen keuangan dasar, pembukuan sederhana, dan cara mengakses permodalan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini penting untuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta untuk perencanaan ekspansi usaha.

Pemenuhan Kriteria Inovasi APE

- **Daya Ungkit:** Program ini memiliki **keterbaruan** karena mengintegrasikan empat sistem (produksi, pengolahan, pemasaran digital, keuangan) yang biasanya berjalan terpisah ke dalam satu paket pembinaan yang utuh untuk KWT.
- **Signifikansi:** Program ini dicapai dengan **cara kreatif** dan **secara strategis mendukung tujuan PUG** karena fokusnya bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi pada peningkatan *kontrol* perempuan atas seluruh rantai nilai agribisnis, dari benih hingga uang di bank.
- **Dampak Masif:** Model "KWT Naik Kelas" ini, jika berhasil di beberapa KWT percontohan, dapat dengan mudah **direplikasi** di desa-desa lain di seluruh Bengkayang, menciptakan dampak ekonomi yang meluas.

3.3. Inovasi Layanan: "Penyuluhan Cerdas Gender & Fasilitas Teknologi Tepat Guna"

Inovasi tidak harus selalu berupa program besar; ia juga bisa berupa perombakan layanan inti yang sudah ada, seperti penyuluhan. Konsep "Penyuluhan Cerdas Gender" adalah mentransformasi peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari sekadar transfer teknologi budidaya menjadi fasilitator pemberdayaan dan gerbang akses teknologi bagi perempuan tani.

Konsep Layanan

Layanan ini merombak tiga aspek penyuluhan: metode penyampaian, materi, dan alat peraga. Tujuannya adalah membuat layanan penyuluhan lebih mudah diakses, lebih relevan dengan kebutuhan perempuan, dan secara nyata memperkenalkan solusi teknologi untuk masalah-masalah spesifik yang mereka hadapi.

Komponen Layanan

1. **Metode Penyampaian Fleksibel:** PPL diinstruksikan untuk tidak lagi kaku dengan jadwal penyuluhan di pagi hari. Mereka harus proaktif berdiskusi dengan kelompok perempuan untuk menemukan waktu dan lokasi yang paling sesuai, misalnya sore hari setelah urusan domestik selesai, di balai dusun atau bahkan di teras rumah salah satu anggota.
2. **Materi Penyuluhan Holistik:** Materi penyuluhan diperkaya dan tidak hanya terbatas pada aspek teknis budidaya. Modul baru harus dikembangkan yang mencakup topik-topik seperti:
 - Pemanfaatan hasil kebun untuk perbaikan gizi keluarga dan pencegahan stunting.
 - Manajemen keuangan rumah tangga dan usaha tani.
 - Kepemimpinan dan komunikasi dalam kelompok.
3. **Demonstrasi Plot (Demplot) Teknologi Ramah Perempuan:** Ini adalah komponen inovasi paling inti. Setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan diwajibkan membuat sebuah demplot percontohan yang secara khusus mendemonstrasikan teknologi yang terbukti mengurangi beban kerja perempuan. Dua teknologi prioritas adalah:
 - **Kultivator Mini (*Mini Cultivator/Tiller*):** Alat ini secara drastis mengurangi kerja fisik yang berat dalam pengolahan tanah (mencangkul), yang seringkali memakan waktu dan tenaga perempuan. Kultivator mini berukuran ringkas, ringan, mudah dioperasikan (bahkan oleh perempuan), dan lebih hemat bahan bakar dibandingkan traktor besar, sehingga sangat ideal untuk lahan pekarangan atau kebun skala kecil yang banyak dikelola perempuan. Demplot ini akan menjadi "etalase hidup" di mana perempuan tani bisa melihat, mencoba, dan meyakini sendiri manfaatnya.
 - **Sistem Irigasi Tetes (*Drip Irrigation*):** Mengangkut air untuk menyiram tanaman adalah salah satu pekerjaan domestik dan pertanian yang paling menyita waktu dan tenaga perempuan. Sistem irigasi tetes sederhana (bisa dibuat dari selang dan botol bekas) mengotomatisasi proses penyiraman, menghemat air hingga 70%, dan membebaskan waktu perempuan untuk kegiatan lain yang lebih produktif atau untuk keluarga. PPL akan mendemonstrasikan cara membuat dan mengoperasikan sistem ini.
4. **Skema Fasilitasi Akses Teknologi:** Demonstrasi saja tidak cukup. Dinas perlu merancang sebuah skema bantuan atau kredit lunak yang memungkinkan KWT atau kelompok perempuan tani untuk secara kolektif memiliki teknologi ini. Bantuan bisa berupa hibah kompetitif bagi KWT dengan proposal terbaik atau subsidi bunga bekerja sama dengan bank lokal.

Bukti Dukung yang Harus Disiapkan

Untuk kedua inovasi ini, Dinas harus menyiapkan portofolio yang meyakinkan:

1. Proposal inovasi yang ditulis dengan baik, menjelaskan latar belakang, tujuan, komponen kegiatan, dan bagaimana inovasi tersebut memenuhi kriteria daya ungkit, signifikansi, dan dampak masif.
2. Dokumentasi lengkap pelaksanaan inovasi, termasuk foto, video, dan testimoni dari perempuan penerima manfaat.

3. Data awal yang menunjukkan dampak. Misalnya, data perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah lahan secara manual vs menggunakan kultivator mini, atau data peningkatan pendapatan KWT yang mengikuti program "Naik Kelas".

Dengan merancang dan mengimplementasikan inovasi-inovasi strategis seperti ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan tidak hanya akan mengumpulkan poin tinggi untuk Bagian III APE, tetapi juga akan memposisikan Kabupaten Bengkayang sebagai pemimpin dalam pembangunan pertanian yang modern, inklusif, dan berkeadilan gender.

Penutup: Rencana Aksi 12 Bulan Menuju Puncak Penilaian APE

Keberhasilan dalam meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama bukanlah hasil dari upaya sesaat, melainkan buah dari implementasi yang terencana, konsisten, dan terukur. Laporan ini telah menguraikan sebuah peta jalan strategis yang komprehensif bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang. Strategi ini bertumpu pada tiga pilar utama yang saling menguatkan: (1) **Penguatan Fondasi Kelembagaan** untuk menciptakan kapasitas internal yang solid; (2) **Sistematikasi Integrasi PUG dalam Siklus Pembangunan** untuk memastikan perspektif gender menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap program dan anggaran; serta (3) **Penciptaan Inovasi Berdampak Tinggi** untuk menghasilkan terobosan yang memberikan manfaat nyata dan menjadi nilai pembeda.

Untuk memastikan strategi ini dapat dieksekusi secara efektif, diperlukan sebuah rencana aksi yang jelas, dengan target waktu yang realistis dan penanggung jawab yang spesifik. Matriks Rencana Aksi 12 Bulan berikut ini berfungsi sebagai alat kendali dan panduan operasional bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas. Matriks ini menerjemahkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang telah dibahas ke dalam serangkaian aktivitas prioritas yang harus dilaksanakan dalam empat triwulan ke depan. Setiap aktivitas secara langsung terhubung dengan indikator penilaian APE, memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas, dan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab. Dengan komitmen penuh untuk menjalankan rencana aksi ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan tidak hanya akan siap menghadapi penilaian APE, tetapi juga akan berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan transformasi sejati di sektor pertanian Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2: Matriks Rencana Aksi Akselerasi PUG Dinas Pertanian dan Perkebunan Bengkayang

| No. | Aktivitas Prioritas | Indikator Penilaian APE Terkait | Indikator Keberhasilan | Linimasa (202X) | Unit Penanggung Jawab |
|-----|---|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| | PILAR 1: PENGUATAN FONDASI KELEMBAGAAN | | | **TW I | TW II |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 1. | Pemetaan Kebutuhan & Pelaksanaan Pelatihan Dasar PUG Internal | I.2.1, I.2.11 | Minimal 80% pejabat Eselon III & IV telah mengikuti sosialisasi PUG internal. | X | |
| 2. | Pengiriman SDM Perencana untuk Pelatihan Teknis PPRG (GAP & GBS) | I.2.1 | Minimal 2 orang perencana kunci memiliki sertifikat pelatihan teknis PPRG. | X | X |
| 3. | Penerbitan/Pembaruan SK & Penyusunan Rencana Aksi Tahunan PUG Focal Point | I.2.3 | Tersedianya SK Focal Point yang valid dan dokumen Rencana Aksi Tahunan. | X | |
| 4. | Pembentukan Tim & Identifikasi Indikator Kunci Data Terpilah Sektoral | I.3.1, I.3.3 | Tersusunnya daftar 15 indikator data terpilah prioritas dan revisi formulir pendataan. | X | |
| 5. | Pengumpulan & Penerbitan Buletin Data Terpilah Sektoral Edisi Pertama | I.3.2, I.3.3 | Terbitnya Buletin Data Terpilah Sektoral Edisi I (Semester I). | | X |
| PILAR 2: INTEGRASI PUG DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN | | | | **TW I | TW II |
| 6. | Pelaksanaan Analisis Gender (GAP) untuk Penyusunan Renja Tahun Berikutnya | II.a.2.1, II.a.2.3 | Tersedianya dokumen GAP yang telah diisi untuk minimal 5 program/kegiatan unggulan. | | X |
| 7. | Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) untuk Sub-Kegiatan Prioritas | II.b.2.1, II.b.2.3 | Minimal 5 sub-kegiatan dalam RKA tahun berikutnya memiliki lampiran GBS/TOR RG. | | |
| 8. | Pemetaan & Klasifikasi Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Kabupaten Bengkayang | II.c.1, II.c.2 | Tersedianya database KWT yang terklasifikasi (Pemula, | X | X |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|--------|-------|
| | | | Berkembang, Maju). | | |
| 9. | Pelaksanaan Program Penguatan KWT (Pelatihan sesuai klasifikasi) | II.c.1 | Terlaksananya minimal 3 paket pelatihan untuk KWT sesuai levelnya. | | X |
| 10. | Penyusunan Pedoman & Pelaksanaan Monev PUG Internal (Triwulanan) | II.d.1.2, II.e.1.2 | Tersedianya Pedoman Monev PUG dan Laporan Monev Triwulanan I, II, dan III. | | X |
| 11. | Integrasi Narasi & Data PUG ke dalam Laporan Kinerja (LAKIP) | II.g.1.2, II.g.1.3 | LAKIP Dinas Tahun Berjalan memuat bab/sub-bab khusus analisis capaian PUG. | | |
| | PILAR 3: PENCIPTAAN INOVASI BERDAMPAK TINGGI | | | **TW I | TW II |
| 12. | Perancangan & Penyusunan Proposal Detail Inovasi "KWT Naik Kelas" | III.1.1 | Tersedianya proposal inovasi yang komprehensif dan siap diajukan. | X | |
| 13. | Pemilihan KWT Percontohan & Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Inovasi "KWT Naik Kelas" | III.1.1 | Terpilihnya 3 KWT sebagai pilot project dan dimulainya pelatihan dasar (pilar 2, 3, 4). | | X |
| 14. | Pembuatan Demplot Teknologi Ramah Perempuan di BPP Kecamatan | III.1.1 | Minimal 2 BPP memiliki demplot aktif (Kultivator Mini & Irigasi Tetes). | | X |
| 15. | Penyusunan Portofolio & Dokumentasi Bukti Dukung Inovasi untuk Penilaian APE | III.1.1 | Tersusunnya portofolio inovasi (termasuk video testimoni) yang siap dilampirkan. | | |